**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*) TERHADAP PERBUATAN JUAL BELI DATA PRIBADI**

****

**Oleh:**

**SYAHRIZAL SULTHON AULIYA RAHMAN**

**(1911121025)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*) TERHADAP PERBUATAN JUAL BELI DATA PRIBADI**

**Oleh:**

**SYAHRIZAL SULTHON AULIYA RAHMAN**

**(1911121025)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

USULAN PENELITIAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL ..................

Oleh

Pembimbing

**Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Siti Ngaisah, S.H., M.H.**

Usulan Penelitian Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji

Pada Tanggal .....................

**Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.** (.......................................................)

**Murry Darmoko, M., S.H.I., M.A.** (.......................................................)

**Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.** (......................................................)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dr. Karim., SH., MH**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrizal Sulthon Auliya Rahman

Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 6 Januari 2001

NIM : 1911121025

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : JL. KH. Mansyur No. 58 RT 002 / RW 001 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul ”Kebijakan Hukum (*Penal Policy*) Terhadap Jual Beli Data Pribadi” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benarbenar hasil karya cipta seniri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 10 Maret 2023

Materai

Rp. 10.000,-

Syahrizal Sulthon Auliya Rahman

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan keindahan, keserasian dan keteraturan kehidupan. Ia sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti, sumber eksplorasi eksistensi diri, sumber dari segala sumber yang menciptakan hati dan nurani.

Allah memberikan kehidupan kepada kita dengan porsi yang sama, takaran dan kadar yang sama pula. Allah tidak pernah membeda-bedakan hidup seorang. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Karena dasar manusia adalah kefitrahan yang dibawanya sejak ia dilahirkan. Itulah muara dari skripsi ini.

Dengan tulus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Brogjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, SH., MH, atas arahannya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Kepada ibu dan ayah serta anggota keluarga lain, terima kasih atas segala dukungan dan keikhlasannya terhadap saya selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan.

Penulis,

Syahrizal Sulthon Auliya Rahman

**ABSTRAK**

Sejauh ini belum ada kebijakan terkait dengan perlindungan data masyarakat serta kasus kebocoran data masyarakat untuk diperjual belikan semakin sering terjadi. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap perbuatan jual beli data pribadi serta membahas dan menganalisa upaya pencegahan terhadap perbuatan jual beli data pribadi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap perbuatan jual beli data pribadi menunjukkan bahwa saat ini pemerintah berupaya untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum pengaturan data pribadi Indonesia yang mengacu kepada *European Union General Data Protection Regulation* (selanjutnya disebut EU GDPR). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan terhadap perbuatan jual beli data pribadi dilakukan dengan membatasi eksistensi di internet, selektif untuk mempublikasikan data diri di internet, memahami peraturan perlindungan data pribadi serta sebaiknya menggunakan sistem aplikasi pengamanan data. Selain itu, pemerintah harus mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta dapat mengupayakan penindakan terhadap pelaku kebocoran data dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan Bab XIII dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai Ketentuan Pidana.

**Kata kunci**: Kebijakan Hukum, Jual Beli, Data Pribadi

***ABSTRACT***

*So far there has been no policy related to the protection of public data and cases of leakage of public data for sale are increasingly frequent. The purpose of this study is to discuss and analyze the criminal law policy (penal policy) against the act of buying and selling personal data and discuss and analyze prevention efforts against the act of buying and selling personal data. This research is included in normative legal research.*

*The results showed that the penal policy on the act of buying and selling personal data shows that the government is currently trying to draft a Personal Data Protection Bill as a legal umbrella for regulating Indonesian personal data which refers to the European Union General Data Protection Regulation (hereinafter referred to as EU GDPR). The results also show that efforts to prevent the act of buying and selling personal data are carried out by limiting existence on the internet, selectively publishing personal data on the internet, understanding personal data protection regulations and preferably using a data security application system. In addition, the government must pass the Personal Data Protection Bill and can seek action against perpetrators of data leakage by providing criminal sanctions in accordance with Chapter XIII in the Personal Data Protection Bill regarding Criminal Provisions.*

***Keywords****: Legal Policy, Buy and Sell, Personal Data*

**DAFTAR ISI**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK viii

*ABSTRACT* ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 4
3. Tujuan Penelitian 5
4. Tujuan Umum 5
5. Tujuan Khusus 5
6. Manfaat Penelitian 5
7. Secara Teoritis 5
8. Secara Praktis 5
9. Kajian Pustaka 6
10. Tindak Pidana 6
11. Jual Beli 14
12. Data Pribadi 15
13. Urgensi Perlindunga Data Pribadi 16
14. Penelitian Terdahulu 18
15. Metode Penelitian 24
16. Jenis Penelitian 24
17. Tipe Penelitian 24
18. Pendekatan Masalah 24
19. Sumber Bahan Hukum dan/atau Data 25
20. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum/Data 26
21. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 26
22. Jadwal dan Lokasi Penelitian 27
23. Sistematika Penulisan 27

BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*) TERHADAP PERBUATAN JUAL BELI DATA PRIBADI 29

1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) 29
2. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) terhadap Perbuatan Jual Beli Data Pribadi 39

BAB III UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PERBUATAN JUAL BELI DATA PRIBADI 49

1. Jual Beli Data Pribadi 49
2. Upaya Pencegahan terhadap Perbuatan Jual Beli Data Pribadi 54

BAB IV PENUTUP 69

1. Kesimpulan 69
2. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………. 71

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Daftar Harga Data Pribadi ……………………………………… 53

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menunjukkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik data pribadi adalah individu yang melekat data perseorangan tertentu.

Kasus kebocoran data masyarakat di Indonesia seakan menjadi hal yang lumrah terjadi. Salah satunya data kartu registrasi sim prabayar milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang bocor ke tangan hacker. Kebocoran data tersebut berjumlah 1.304.401.300 dan diunggah oleh akun bernama Bjorka dalam forum Breached.to. Data berjumlah 87 GB tersebut diklaim berisi NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi dan tanggal registrasi.[[1]](#footnote-1)

Pada sisi lain, publik menyoroti adanya regulasi dari kementerian Kominfo terkait dengan pendaftaran kartu SIM pada tahun 2017 di mana masyarakat diwajibkan untuk mendaftarkan nomor ponsel dan mengisi NIK serta nomor Kartu Keluarga (KK). Aturan atau regulasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Aturan tersebut mewajibkan pengguna untuk melakukan registrasi kartu SIM prabayar baik lama maupun baru untuk semua operator mulai 31 Oktober 2017.

Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementeran Dalam Negeri, serta operator seluler kompak mengelak bahwa kebocoran data tersebut bersumber pada pihaknya. Kominfo menyatakan bahwa pihanya tengah menelusur lebih lanjut guna mengetahui sumber data dan hal lainnya. Selain itu, pihak provider menyatakan siap untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk menangani dugaan kasus kebocoran data yang ada.[[2]](#footnote-2)

Konsep perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan hak privasi, di mana pemilik data memiliki kuasa atau kendali untk menyebarkan atau tidak informasi yang dimiliki. Namun nyatanya, perlindungan data sebagai hak asasi manusia terbentur oleh lajur kapital karena secara ekonomi data pribadi memiliki nilai jual tinggi yang mampu memutar roda perekonomian global. Kondisi ini menjadi ancaman nyata mengingat pemanfaatan teknologi tidak lagi dapat dibendung termasuk kegiatan pengumpulan data pribadi secara massal baik secara *online* maupun *offline*, melalui media sosial, catatan kependudukan, kesehatan, perekonomian sampai penegakan hukum. Terkait demikian, diperlukan peran Negara untuk membuat Undang-Undang dalam memberikan jaminan perlindungan data privasi masyarakat. Indonesia dianggap masih absen dalam perlindungan data pribadi. Hal tersebut berdampak pada mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh swasta atau Negara tidak memiliki kepastian hukum dan berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan. Efek nyata yang tampak adalah masyarakat dirugikan karena tidak ada perlindungan pada data privasi.[[3]](#footnote-3)

Sejauh ini belum ada kebijakan terkait dengan perlindungan data masyarakat serta kasus kebocoran data masyarakat untuk diperjual belikan semakin sering terjadi. Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi yang komprehensif mengenai data pribadi dalam satu peraturan khusus mengingat konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan data dalam UUD 1945. Pada UUD 1945, secara implisit menunjukkan bahwa terkait perlindungan data hanya ditemukan pada Pasal 28F dan Pasal 28 G ayat (1) mengenai kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan atas data dan informasi yang melekat kepadanya.

Penelitian Lesmana, Elis dan Hamimah menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, dengan banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan data pribadi sehingga Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat segera disahkan sebagai bentuk perwujudan perlindungan Negara atas pemenuhan hak privasi warna Negara.[[4]](#footnote-4) Pada sisi lain penelitian Kosegeran, Rumimpunu dan Tooy menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral Pengaturan perlindungan data pribadi pada level Undang-Undang dibutuhkan karena perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi warga Negara. Selain itu, implementasi dari kebijakan hukum perlindungan data saat ini dinilai belum berjalan dengan baik.[[5]](#footnote-5) Senada dengan hal tersebut, penelitian Kusnadi dan Wijaya juga menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan pada data pribadi.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan jual beli dalam hukum Indonesia. Terkait demikian, judul penelitian yang digunakan adalah “Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) terhadap Perbuatan Jual Beli Data Pribadi”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap perbuatan jual beli data pribadi?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap perbuatan jual beli data pribadi?
3. **Tujuan Penelitian**
4. **Tujuan Umum**

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum pidana pada perbuatan jual beli data pribadi.

1. **Tujuan Khusus**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap perbuatan jual beli data pribadi serta membahas dan menganalisa upaya pencegahan terhadap perbuatan jual beli data pribadi.

1. **Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat dilakukan penelitian ini:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama perbuatan jual beli data pribadi.

1. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam menegakkan hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi masyarakat akibat perbuatan jual beli data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

1. **Kajian Pustaka**
2. **Tindak Pidana**
3. **Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan di mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.[[7]](#footnote-7)

Menurut J.E Konkers, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hubun yang berhubungan dengan kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertaggungjawabkan. H.J Van Schravendijk menunjukkan bahwa tindak pidana adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan tersebut diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan. Selain itu, Simons menunjukkan bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[[8]](#footnote-8)

Menurut Van Hammel, tindak pidana merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana yang dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana serta delik. Tindak pidana memiliki beberapa unsur yang terdiri dari: a) Suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum); b) Adanya unsur kesalahan; serta c) Dapat dikenai dengan sanksi pidana (dapat dipertanggungjawabkan).[[9]](#footnote-9)

1. **Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan objektif:[[10]](#footnote-10)

1. Unsur subjektif

Merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri sei laku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati. Unsur subjektif tindak pidana terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa dan dolus)
2. Maksud dan voornemen pada suau percobaan dan poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 kUHP.
6. Unsur objektif

Merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Unsur objektif tindak pidana terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pada sisi lain, adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yang terdiri dari:[[11]](#footnote-11)

1. Perbuatan oleh manusia
2. Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil)

Syarat formil harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

1. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat materiil harus ada karena perbuatan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Terkait demikian hal tersebut bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut.

1. **Penggolongan Tindak Pidana**

KUHP menggolongan tindak pidana menjadi dua golongan yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan berikut kelompok pidana yang ada di dalamnya:[[12]](#footnote-12)

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara
2. Kejahatan-kejahatan terhada martabat presiden dan wakil presiden
3. Kejahatan-kejahatan terhadap Negara sahabat dan terhadap kepala Negara sabahat serta wakilnya
4. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum
6. Perkelahian tanding
7. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang
8. Kejahatan terhadap penguasa umum
9. Sumpah palsu dan keterangan palsu
10. Pemalsuan mata uang dan uang kertas
11. Pemaksuan materai dan merek
12. Pemalsuan surat
13. Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan
14. Kejahatan terhadap kesusilaan
15. Meninggalkan orang yang perlu ditolong
16. Penghinaan
17. Membuka rahasia
18. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang
19. Kejahatan terhadap nyawa
20. Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan
21. Pelanggaran
22. Pemerasan dan pengancaman
23. Penggelapan
24. Perbuatan curang atau penipuan
25. Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak
26. Menghancurkan atau merusakkan barang
27. Kejahatan jabatan
28. Kejahatan pelayaran
29. Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan
30. Penadahan, penerbitan dan percetakan
31. Aturan tentan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab

Pada sisi lain, pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP dan berikut yang termasuk dalam kelompok tindak pidana pelanggaran:

1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
2. Pelanggaran ketertiban umum
3. Pelanggaran terhadap penguasa umum
4. Pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan
5. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
6. Pelanggaran kesusilaan
7. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan
8. Pelanggaran jabatan
9. Pelanggaran pelayaran
10. **Jenis-jenis Tindak Pidana**

Apabila dilihat dari jenisnya, tindak pidana atau delik terdiri dari:[[13]](#footnote-13)

1. Delik formal dan delik material
2. Delik formal

Merupakan delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

1. Delik material

Merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki tersebut terjadi. Apabila belum, maka palng banyak hanya ada percobaan.

1. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*
2. Delik *commissionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilatang seperti pencurian, penggelapan dan penipuan.

1. Delik *omissionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah yaiu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan.

1. Delik *commissionis per omissionen commissisa*

Delik yang berupa pelangaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

1. Delik *dolus* dan delik *culpa*
2. Delik *dolus*

Merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan.

1. Delik *culpa*

Merupakan delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

1. Delik tunggal dan delik berganda
2. Delik tunggal

Merupakan delk yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

1. Delik berganda

Yaitu delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

1. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus memiliki ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.

1. Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena.

1. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

Delik yang ada pemberatannya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang lain.

1. **Jual Beli**

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara fitrah dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang atau barang dengan uang. Jual beli dianggap sebagai transaksi tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.[[14]](#footnote-14)

Jual beli adalah pemindahan kepemilikan yang diperoleh dari tukar menukar harta benda dari kedua belah pihak. Jual beli berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[[15]](#footnote-15)

Pasal 1457 KUHPerdata menunjukkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar yang memiliki nilai atau manfaat dengan atas dasar merelakan atau saling terbuka. Jual beli dianggap sebagai kebutuhan penting dalam sehari-hari bagi manusia.[[16]](#footnote-16)

1. **Data Pribadi**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menunjukkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik data pribadi adalah individu yang melekat data perseorangan tertentu.

Data pribadi dianggap sebagai hak kebendaan. Data pribadi berimplikasi sebagai hak asasi manusia yang melekat pada individu sehingga tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Penggunaan data pribadi tersebut oleh pihak lain harus berlandaskan persetujuan individu yang bersangkutan. Data pribadi juga dianggap sebagai properti hak privasi yang dimaksudkan sebagai perlindungan yang melekat terhadap data pribadi sebagaimana hak kebendaan yang dapat dialihkan oleh pemegang hak kepada pihak lain. Secara garis besar, data pribadi dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menjadikan data pribadi melekat pada tiap individu.[[17]](#footnote-17)

Data pribadi perlu dilindungi karena menyangkut data diri tentang seseorang yang dapat diidentifikasi atau teridentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik. Beberapa data yang termasuk data pribadi yakni nomor telepon, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua, keluarga, alamat, riwayat kesehatan dan sebagainya yang melekat pada individu. Pada praktiknya, banyak kasus penipuan kartu kredit, peminjaman uang atau penggelapan yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.[[18]](#footnote-18)

1. **Urgensi Perlindungan Data Pribadi**

Konsep perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan hak privasi, di mana pemilik data memiliki kuasa atau kendali untk menyebarkan atau tidak informasi yang dimiliki. Namun nyatanya, perlindungan data sebagai hak asasi manusia terbentur oleh lajur kapital karena secara ekonomi data pribadi memiliki nilai jual tinggi yang mampu memutar roda perekonomian global. Kondisi ini menjadi ancaman nyata mengingat pemanfaatan teknologi tidak lagi dapat dibendung termasuk kegiatan pengumpulan data pribadi secara massal baik secara *online* maupun *offline*, melalui media sosial, catatan kependudukan, kesehatan, perekonomian sampai penegakan hukum. Terkait demikian, diperlukan peran Negara untuk membuat Undang-Undang dalam memberikan jaminan perlindungan data privasi masyarakat.

Indonesia memiliki 30 regulasi yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi, termasuk penyadapan. Kewenangan tersebut dilakukan untuk berbagai macam bidang seperti media telekomunikasi, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kesehatan, kependudukan, perdagangan serta perekonomian. Namun tidak seluruhnya memberikan perlindungan hukum yang nyata dengan prosedur yang jelas. Indonesia dianggap masih absen dalam perlindungan data pribadi. Hal tersebut berdampak pada mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh wasta atau Negara tidak memiliki kepastian hukum dan berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan. Efek nyata yang tampak adalah masyarakat dirugikan karena tidak ada perlindungan pada data privasi.

Perlindungan data pribadi sebenarnya memberikan dampak bagi perekonomian Negara. Hal tersebut dikarenakan adanya perlindungan membuat Indonesia mampu membuka karpet merah bagi investor dengan menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan tepercaya, termasuk kepentingan konsumen, yang akan merasa aman dalam melakukan transaksi ekonomi. Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi penting karena mereproduksi kebebasan warga dalam berekspresi. Keberanian warga dalam mengekspresikan gagasan akan terlaksana apabila pihaknya telah memperoleh jaminan perlindungan privasi.[[19]](#footnote-19)

1. **Penelitian Terdahulu**

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadian acuan dan perbandingan pada penelitian ini:

Pertama, penelitian oleh Lesmana, Elis dan Hamimah berjudul “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengkaji urgensi dari regulasi tentang perlindungan data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas privasi warga negara Indonesia yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia. Penelitian tersebut termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi akibat dari semakin berkembangnya penggunaan digital platform yang tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai. Maka dari itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat segera disahkan untuk mengisi adanya kekosongan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi karena perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi merupakan kewajiban konstitusi negara yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi merupakan perwujudan perlindungan negara atas pemenuhan hak privasi warga negara.[[20]](#footnote-20)

Kedua, penelitian Kosegeran, Rumimpuni dan Tooy berjudul “Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana peran penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi dimasa yang akan datang ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana. Penelitian tersebut termasuk dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengakui bahwa perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi manusia. Pengakuan tersebut terefleksi, baik dalam konstitusi maupun beragam peraturan selevel undang-undang. Namun demikian, peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada level undang-undang belum dimiliki. Untuk mengisi kekosongan hukum, pengaturan detail mengenai perlindungan data pribadi diakomodir dalam peraturan pada level peraturan menteri maupun peraturan teknis sektoral. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral. Kebutuhan pengaturan perlindungan data pribadi pada level undang-undang dibutuhkan karena perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi warga negara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan hukum perlindungan data saat ini dinilai belum berjalan dengan baik. Dalam konsep pengaturan perlindungan data pribadi diharapkan adanya aturan yang lebih tegas dan komprehensif dan sesuai dengan perkembangan sosial budaya, ekonomi serta politik serta menjungjung tinggi nilai-nilai atau norma, etika dan kesusilaan serta agama, dengan harapan hukum tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Berkenaan dengan hal tersebut selain diperlukan tindakan preventif atau sikap berhati-hati dari setiap orang untuk melindungi datanya masing-masing, pemerintah dan penyedia layanan diwajibkan untuk membuat mekanisme verifikasi secara jelas diatur dalam bentuk undang-undang.[[21]](#footnote-21)

Ketiga, penelitian oleh Kusnadi dan Wijaya berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk menemukan hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Penelitian tersebut termasuk dalam penelitian yuridi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi adalah hak kosntitusional warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUDNRI Tahun 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G ayat (1). Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadis ebagai privasi di Indonesia saat ini menerapkan beberapa pasal yang tersirat mengatur mengenai data pribadi. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang menjadi dasar hukum pelrindungan data pribadi sehingga saat ini Indonesia memiliki kekosongan norma.[[22]](#footnote-22)

Keempat, penelitian oleh Natha, Budiartha dan Astiti berjudul “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (*Marketplace*)”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi para konsumen terkait perdagangan elektronik berdasar aturan undang-undang di Indonesia serta penyelesaian sengketa atas kasus kebocoran data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik pengguna *marketplace*. Penelitian tersebut termasuk dalam penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki kesadarana atas data pribadi sangatlah penting untuk terhindar dari korban penyalahgunaan serta kebocoran data pribadi. Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah kebocoran data pribadi yaitu cek kebocoran data lewat situs, cek informasi debitur di SLIK secara berkala, belajar curiga sebagai bentuk waspada, awasi password dan kode OTP, aktif bank alert, hindari fotokopi KTP, jangan umbar data diri. Tindakan represif yang dilakukan selama ini masih kurang optimal terlebih lagi masalah belum selesainya pembuatan aturan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai data pribadi yang sampai sekarang masih ada di tahap perancangan. Namun pemerintah Indonesia sudah membuat bermacam aturan undang-undang yang menentukan perihal privasi di bermacam bidang. Terlampir beberapa aturan perihal perlindungan data pribadi pengguna di perdagangan digital, pada yaitu UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK): terdapat bermacam faktor, seperti hak pengguna guna memaksimalkan layanan, hak pengguna melakukan tuntutan atas ganti rugi, hak pengguna untuk mengadukan permasalahan dan UU Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terlihat dari pengaturan mengenai pertanggungjawaban dan pemberian ganti rugi. Penyelesaian sengketa atas kasus bocornya data pribadi konsumen pengguna marketplace, yakni pemilik data pribadi bisa menyelesaikan sengketa secara nonligitasi melalui pengajuan aduan ke Menteri Komunikasi dan Informatika atau bisa secara litigasi bila dalam menyelesaikan sengketa secara perundingan atau penyelesaian alternatif lain belum, bisa menyelesaikan sengketa tersebut, maka masing-masing pemilik data pribadi maupun penyelenggara sistem elektronik bisa mengajukan gugatan perdata terhadap kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Gugatan sekadar gugatan perdata dan terajukan berdasar aturan undang-undang.[[23]](#footnote-23)

Kelima, penelitian Angriani berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis kesesuaian undang-undang yang berlaku dengan hukum Islam tentang data pribadi dalam transaksi *e-commerce*. Penelitian tersebut termasuk dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengatur masalah perlindungan hukum data Privasi untuk dapat menciptakan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Perbedaannya, hukum Islam tidak menjelaskan secara eksplistit atau terperincir mengenai aturan pentingnya melindungi privasi. Hukum Islam lebih mengedepankan nilai-nilai religius yang bersumber dari al-quran dan hadis, serta mengedapankan ketaatan atas perintah Allah SWT dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, sedangkan hukum postif menjelaskan lebih terperinci tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* yang mengedepankan prinsip pembuatan aturan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan yang lebih mengedapankan kewajiban pemerintah untuk melindugi masyarakatnya (hubungan horizontal/hablum minanna atau hubungan atar manusia).[[24]](#footnote-24)

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatig adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Penelitian hukum normatif juga dianggap sebagai penelitian untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menliti bahan pustaka.

1. **Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian tipe yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan enganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan menekankan pada aspek hukum. Penggunaan tipe penelitian yuridis normatif diharapkan dapat dilakukan kajian dan analisis secara komprehensif, sehingga akan diperoleh preskripssi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal.[[25]](#footnote-25)

1. **Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil telaah atas pendekatan demikian merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena dimungkinkan terdapat suatu pendekatan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan, hal-hal yang menjadi permasalahan. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang dihadapi.[[26]](#footnote-26)

1. **Sumber Bahan Hukum dan/atau Data**

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan dasar (UUD 1945 dan Ketetapan MPR).[[27]](#footnote-27)

1. Bahan hukum sekunder

Berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian yang tersaji dalam bentuk laporan, hasil karya dari kalangan hukum yang berupa buku, majalah, artikel, makalah ilmiah dan lain-lain.[[28]](#footnote-28)

1. Bahan hukum tersier

Berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus terminologi hukum, ensiklopedia, bibliografi dan lain-lain.[[29]](#footnote-29)

1. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum/Data**

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode bola saju (*snow ball theory*), kemudian diinventarisisasi da diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penatalaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian, diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian penulisan penelitian ini.[[30]](#footnote-30)

1. **Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Penelitian hukum berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mendeskripsikan bahan-bahan yang diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera dalam bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum. Pada praktiknya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dan diolah kemudian disusun secara sistematis dan terarah menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisis akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum bersaranakan logika deduksi. Dari hasil analisis, ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan, meskipun tidak menghasilkan asas hukum atau teori hukum yang baru, akan tetapi setidaknya dapat menghasilkan konsep yang baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu yang diajukan.[[31]](#footnote-31)

1. **Jadwal dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai Mei 2023 di Surabaya.

1. **Sistematika Penulisan**

Berikut sistematika penulisan penelitian ini:

Bab I sebagai pendahuluan berisi dari beberapa bagian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjawab rumusan masalah pertama penelitian yaitu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap perbuatan jual beli data pribadi.

Bab III menjawab dari rumusan masalah kedua penelitian yaitu upaya pencegahan terhadap perbuatan jual beli data pribadi.

Bab terakhir dalam penulisan ini adalah bab IV sebagai penutup, yang berisi beberapa kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, dan disertai dengan saran dari penulis atas hasil dari pembahasan yang telah dilakukan.

**BAB II**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*) TERHADAP PERBUATAN JUAL BELI DATA PRIBADI**

1. **Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)**

Kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Istilah *penal policy* identik dengan isstilah kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Terkait demikian, kebijakan penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana harus rasional karena termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tikda merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan pemikiran dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.[[32]](#footnote-32)

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat dilihat pada tiga arti. Secara sempit, kebijakan hukum pidana merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Secara luas, kebijakan hukum pidana merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan posisi. Pada artian paling luas, kebijakan hukum pidana merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Sebagai ciri hukum pidana dalam Negara modern, kebijakan hukum pidana memiliki pengaruh penting dalam menentukan arah dan pembaruan hukum pidana. Pada konteks ini, kebijakan hukum pidana meletakkan dasar bagi perilaku tertentu yang dilarang, penerapan ketentuan tertentu serta lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum. Kebijakan hukum pidana bertugas memberikan masukan bagi legislasi dan memformulasi kemampuan lembaga-lembaga yang berwenang atas penegakan hukum sehingga keberlakuan dan efektivitas hukum pidana dalam menjalankan fungsi dapat tercapai dengan baik.[[33]](#footnote-33)

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenap apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema yang dimiliki oleh hukum pidana dan dengan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan itu sehinggaa tercipta hukum pidana yang baik sebagai sarana penal dalam penanggulangan kejahatan. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga dianggap sebagai kebijakan dalam penciptaan hukum untuk menentukan isi dan arah hukum serta hal-hal apa yang dijadikan kriteria untuk merumuskan hukum pidana yang baik. Pembentukan hukum pidana harus diarahkan untuk membangun suatu substansi hukum yang bersifat responsif yang mampu menjadi sarana pembaruan dan pembangunan bagi kepentingan Nasional untuk mewujudkan ketertiban, legitimasi dan keadilan dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana meliputi penyempurnaan sistem peradilan pidana dan kebijakan tersebut harus mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat, bersifat universal dan dinamis serta berhubungan dengan beberapa hal, antara lain:[[34]](#footnote-34)

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan hukum pidana
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan atau politik hukum pidana yang dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Kebijakan kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat dan Negara untuk menanggulangi masalah kejahatan. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukumm. Penegakan hukum pidana sebagai upaya untuk merealisasikan cita-cita hukum menjadi kenyataan. Cita-cita hukum yang dimaksud yaitu pikiran-pikiran badan legislator yang dirumuskan dalam ketentuan norma hukum. Relevansinya adalah kebijakan hukum pidana yang dilahirkan dari kehendak penguasa merupakan wujud nyata dari cita hukum yang sebelumnya bersifat abstrak telah dirumuskan dengan sebaik mungkin untuk pemberantasan tindak pidana.[[35]](#footnote-35)

Politik atau kebijakan hukum pidana dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat.[[36]](#footnote-36) Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan masa yang akan datang. Kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari struktur, substansi dan budaya hukum. Hal ini dikaranekan Undang-Undang merupakan bagian substansi hukum, pembaruan hukum pidana, di samping memperbaruhi perundang-undangan juga mencakup pembaruaan ide dasar dan ilmu hukum pidana. Kebijakan hukum pidana tidak dapat terlepas dari tujuan penanggulangan pidana sehingga kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Sedangkan usaha penanggulangan pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial. Kebijakan sosial sendiri dianggap sebagai usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.[[37]](#footnote-37)

Kebijakan hukum pidana dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Saat menghadapi masalah kriminalisasi, maka harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:[[38]](#footnote-38)

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila. Terkait demikian, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan berbagai faktor termasuk:[[39]](#footnote-39)

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lannya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Dewasa ini pemerintah memiliki peranan besar dalam kehidupan kemasyarakatan dalam rangka mensejahterahkan warga juga melindungi masyarakat. Pemerintah harus melindungi kehidupan ekonomi warga, kesehatan, lingkungan hidup, menyediakan lapangan kerja, menyediakan sandang, pangan, papan dan sebagainya. Dengan kata lain, pemerintah harus mengatur semua bidang kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yaitu mensejahterahkan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini menggunakan semua sarana yang ada padanya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu sarana tersebut adalah dengan peraturan perundang-undangan. Hukum pidana dianggap paling efektif untuk menegakkan peraturan perundang-undangan karena berkaitan dengan sanksi pidana yang relatif lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari bidang hukum lainnya. Dengan sanksi yang lebih tajam, hukum pidana dipandang lebih efektif untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana berkaita dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh yang diarahkan pada konkretisasi, operasionalisasi, fungsionalisasi hukum pidana materiil (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana adalah garis pidana yang menentukan:[[40]](#footnote-40)

1. Seberapa jauh ketentuan-keentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui
2. Apa yang diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari Negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap Negara (pemerintah) dalam menanggulangi ejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan di antaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana dala mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu langkah kebijakan. Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal dapat dilakukan melalui proses yang terdiri dari tiga tahap antara lain:[[41]](#footnote-41)

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

Kebijakan hukum pidana yang dilakukan pada tahap formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentk perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa dalam kebijakan formulasi merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat Undang-Undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi probema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan. Sebagai salah satu bagian dari mata rantai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka tahap formulasi hukum pidana harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil dalam hal terjadi suatu pelanggaran hukum. Terkait demikian, tahap ini harus merupakan perencanaan yang strategis yang diharapkan dapat memberikan arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana sehingga kebijakan yang dirumuskan merupakan suatu kesatuan sistem yang rasional dalam rangka penanggulangan kejahatan.

Secara garis besar tahap formulasi suatu kebijakan hukum pidana yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dibuat dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya.
3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Pada tahap formulasi, penggunaan kebijakan hukum pdana dalam menanggulangi kejahatan harus berhati-hati, cermat dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan antara lain:

1. Hukum pidana, jangan digunakan semata-mata pembalasan
2. Hukum pidana, jangan digunakan hanya untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan
3. Hukum pidana, jangan hanya digunakan untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan
4. Hukum pidana, jangan digunakan apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lain lebih besar dari kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri
5. Hukum pidana, dilarang mengandung sifat lebih berlebihan daripada perbuatan yang akan dicapai
6. Hukum pidana, jangan membuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik
7. Hukum pidana angan membuat larangan-larangan atau ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan.
8. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)

Tahap ini merupakan tahap penerapan Undang-undang dan kemudian Undang-undang yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Hukum yang telah diformulasikan dalam bentuk Undang-Undang kemudian dilaksanakan pada tahap aplikasi yaitu tahapan atau proses penerapan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang telah ditetapkan terhadap kejahatan yang terjadi. Tahap aplikasi terdiri dari:

1. Kinerja aparat (lembaga) penerapan hukum pidana
2. Prosedur dan mekanisme penerapan hukum pidana, pada tiap tingkatan peradilan yang berjalan
3. Hubungan di antara komponen-komponen peradilan pidana.
4. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Merupakan tahapan pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Operasionalisasi ketiga tahap kebijakan yang telah diuraikan di atas membutuhkan kewenangan agar tahap-tahap tersebut dapat terlaksana. Kewenangan tersebut berupa kewenangan membuat Undang-Undang (kewenangan formulasi/legislasi), kewenangan menerapkan Undang-Undang (kewenangan aplikasi/yudikatif) dan kewenangan melaksanakan Undang-Undang (kewenangan eksekui/administratif). Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana (berisi aspek substantif, struktural dan kultural), aplikasi oleh aparat penegak hukum dan eksekusi oleh aparat pelaksana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana memerlukan sinkronisasi dari ketiga tahap tersebut agar penegakan hukum pidana dapat berjalan secara maksimal.[[42]](#footnote-42)

1. **Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) terhadap Perbuatan Jual Beli Data Pribadi**

Kebijakan hukum pidana merupakan upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan salah satu tahapan dari kebijakan hukum pidana yang terwujud dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif dapat diartikan ssebagai kebijakan yang dibuat oleh badan yang berwenang membuat Undang-Undang. Kebijakan legislatif dianggap sebagai kebijakan yang paling penting karena pada tahapan kebijakan legislatif diformulasikan konsep ataupun asas yang menjadi garis pokok dan dasar di dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang sekaligus juga merupakan suatu landasan legalitas bagi tahapan-tahapan berikutnya dalam proses peradilan pidana.[[43]](#footnote-43)

Kebijakan hukum pidana mencakup pengetahuan dan seni yang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan praktis, yang memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan lebih baik dan memberikan panduan tidak hanya bagi pembuat Undang-undang tetapi juga bagi pengadilan yang menerapkan Undang-Undang tersebut dan bagi aparat koreksi yang menjadikan putusan-putusan pengadilan memiliki efek praktis.[[44]](#footnote-44)

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan sehingga kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukm (khususnya penegakan hukum pidana) sehingga politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian drai kebijakan penegakan hukum. Selain itu, usaha penannggulangan kejahatan melalui pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) sehingga apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial.

Pada sisi lain, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara sehingga hukum positif selalu harus ditata. Praktiknya, terdapat delapan prinsip hukum antara lain:[[45]](#footnote-45)

1. Hukum harus berlaku umum, menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dibolehkan.
2. Hukum harus diumumkan secara luas atau masyarakat memiliki akses untuk mengetahui. Publikasi hukum ini untuk memberikan kepastian bahwa warga masyarakat mengetahui apa yang diperintahkan oleh hukum.
3. Hukum harus berlaku ke depan (prospektif), menentukan bagaimana individu harus berperilaku di masa depan agar lebih baik daripada perilaku yang dilarang di masa lalu.
4. Hukum harus jelas di mana warga masyarakat haruss mampu mengidentifikasi apa yang dilarang, diizinkan atau diperintahkan oleh hukum.
5. Hukum tidak boleh mengandung hal-hal yang kontradiktif. Hukum yang satu tidak boleh bertentangan satu sama lain.
6. Hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan.
7. Hukum seharusnya tidak sering berubah. Hal ini dikarenakan masyarakat mendambakan atau menginginkan hukum yang relatif tetap.
8. Harus ada kesesuaian antara apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang dengan tindakan aparatur-aparatur penegak hukum itu sendiri.

Penyusunan kebijakan hukum pidana dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal tersebut akan dapat menciptakan kebijakan hukum pidana yang memenuhi kaidah-kaidah kemanusiaan, sekaligus dapat menghindari potensi terjadinya kebijakan hukum yang mencederai hak-hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara.[[46]](#footnote-46)

Pada kisaran tahun 2021 sampai 2022 banyak terjadi aksi peretasan data pribadi, data pemerintah sampai jual beli data pribadi dalam *dark web* atau pada *deep web*. Data pribadi memuat informasi seseorang yang berpengaruh terhadap kenyamanan orang tersebut apabila informasi atau data pribadi diketahui oleh orang lain atau publik. Perkembangan selanjutnya mengenai hak atas privasi pada era digital ketika kekuatan data menjadi poin utama dan memiliki nilai ekonomi. Selain itu, hak privasi sebagai dari properti di mana dalam data dan informasi pribadi memiliki *market value*. Hal ini terlihat pada industri digital di mana nilai perusahaan rintisan semakin tinggi apabila memiliki jumlah pengguna yang semakin banyak.

Data pribadi di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diartikan sebagai setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik/atau non-elektronik. Pengertian serupa juga tercantum di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun RUU Perlindungan Data Pribadi lebih membagi data pribadi menjadi dua sifat. Yaitu data pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Yang kemudian data pribadi yang bersifat spesifik yang meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kasus jual beli data pribadi nasabah atau pelanggaran terus berulang. Beberapa jenis data yang bisa diperjualbelikan antara lain:[[47]](#footnote-47)

1. Nasabah prioritas bank
2. Pengguna nomor telepon seluler di kota besar
3. Pemilik apartemen atau mobil mewah
4. Pengguna kartu kredit bank
5. Peserta asuransi
6. Klien iklan

Selain melalui pembocoran data secara manual oleh orang dalam bank, informasi rahasia nasabah sering dibobol dengan modus phishing dan skimming. Phishing merupakan penipuan untuk mendapatkan informasi rahasia nasabah seperti user ID, PIN dan data kartu kredit dengan cara membuat situs palsu dengan alamat dan tampilan yang mirip dengan situs resmi milik bank. Sedangkan skimming adalah praktik pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat dalam strip magnetik kartu kredit atau debit.[[48]](#footnote-48)

Mengenai data yang diperjualbelikan maka sanksi yang diberikan sangat berat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomot 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, maka pihak bank tidak akan melakukan jual beli data. Pelaku jual beli data yang paling memungkinkan adalah oknum marketing.[[49]](#footnote-49)

Adanya karakter transnasional dari jaringan internet dan pertumbuhan ekonomi global, hak penggunaan data dan regulasi perlindungan data masih sangat terfragmentasi. Peraturan terkait pengambilan, pemrosesan dan jual beli data pribadi telah didefinisikan dengan baik di Eropa namun masih lemah atau sama sekali kurang di wilayah-wilayah kekuasaan hukum lain termasuk Indonesia. Pengumpulan gabungan data dalam jumlah besar telah memungkinkan operator-operator daring besar menyimpulkan lebih banyak informasi daripada yang sebelumnya disediakan (baik secara implisit ataupun eksplisit) oleh para pengguna. Perincian profil pengguna melalui analisis data raksasa dan teknik simpulan telah membuka jalan untuk munculnya beragam jasa baru yang sifatnya lebih spesifik dan personal, yang dapat menguntungkan para pengguna namun jua meningkatkan kekhawatiran penting saat bersinggungan dengan privasi pengguna dan otonomi individu. Dengan meningkatnya kekhawatiran seputar kriminalitas siber dan pencurian identitas di berbagai wilayah, keseimbangan antara pengawasan dan kebebasan harus mampu menyentuh soal peningkatan pemantauan.[[50]](#footnote-50)

Data pribadi dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Implikasi data pribadi sebagai hak asasi manusia berarti melekat kepada tiap individu sehingga tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain, adapun penggunaan data pribadi tersebut oleh pihak lain harus berdasarkan persetujuan individu terebut. Adapun pengecualian terhadap persetujuan memerlukan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan konsep data pribadi (hak privasi) sebagai properti dimaksudkan sebagai perlindungan yang melekat terhadap data pribadi sebagaimana hak kebendaan yang dapat dialihkan oleh pemegang hak kepada pihak lain. Perlakuan data pribadi sebagai properti memerlukan biaya dan sistem yang baik untuk menjadikan hak kebendaan dapat berjalan yang apabila dibandingkan HAKI maka nilai ekonominya tidak sebanding dengan tingginya biaya yang diperlukan. Data pribadi sebagai bagian dari HAM menjadikan data pribadi melekat pada tiap individu. HAM sendiri tidak hanya dilihat dalam kerangka fisik saha tetapi unsur non fisik manusia sebagaimana informasi atau data mengenai seseorang perlu mendapatkan perlindungan.

Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya, dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pun sudah jelas dikatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia wajib melindungi segenap bangsa, dan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) pun menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat perlindungan diri pribadi...” memang tidak dijelaskan perlindungan diri seperti apa namun dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi juga termasuk perlindungan diri dari hak privasi, di mana setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan menyampaikan sidang bersama DPD RI dan DPR RI bahwa data sebagai sumber kekayaan Indonesia, kedaulatan data harus diwujudkan terutama mengenai data pribadi sehingga harus disiapkan regulasinya. Data pribadi perlu mendapat perhatian yang khusus di mana terlihat dari tindak lanjut tersebut, maka pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut RUU PDP) ke DPR melalui Surat Presiden No R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Indonesia belum memiliki Undang-undang khusus tentang data pribadi, pengaturannya saat ini masih tersebar dalam berbagai Undang-Undang. Pengertian data pribadi didefinisikan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Namun, Undang-Undang tersebut belum mengatur mengenai penggunaan dan perlindungan data pribadi ssebagai faktor penting dalam era digital. Pada sistem elektronik, pengaturan perlindungan data pribadi diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) kemudian secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Hukum Keperdataan di Indonesia masih mengacu kepada KUHPerdata yang berasal dari *Burgerlijk Wet Book* yang berlaku di Indonesia berdasaran asas konkordansi sejak tahun 1926. Orang perorangan sebagau subjek hukum diatur dalam Buku I KUHPerdata termasuk diatur informasi atau data pribadi yang berkaitan dengan pencatatan oleh catatan sipil yang selanjutnya mekanisme administrasi pencatatan diatur dalam UU Adminduk sehingga secara perdata data pribadi sebagai hak orang perseorangan pada Buku I bukan sebagai hak kebendaan dalam Buku II.

Praktiknya, era digital tidak hanya menyangkut data atau informasi mengenai perseorangan secara langsung tetapi secara lebih luas mengenai data yang dapat mengidentifikasikan seseorang langsung maupun tidak langsung dalam sistem elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE dan peraturan pelaksana. Pada aturan terebut, meskipun tidak ditegaskan mengenai jenis hak atas data pribadi, tetapi dasar penggunaan data pribadi yang diatur dalam Pasal 26 UU ITE diatur lebih lanjut pada Pasal 14 PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 mendasarkan penggunaan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi.

Penyusunan pada RUU PDP yang akan digunakan sebagai payung hukum pengaturan data pribadi Indonesia mengacu kepada *European Union General Data Protection Regulation* (selanjutnya disebut EU GDPR) yang tercantum dalam Naskah Akademik RUU PDP terutama berkaitan dengan ketentuan mendasar mengenai dasar pemrosesan data pribadi yang diatur dalam *Article 6 EU GDPR*. Data pribadi sebagai hak dasar dalam kerangka hak asasi manusia, landasan yuridis dalam dasar menimbang RUU PDP maupun diuraikan dalam naskah akademik yang mengacu kepada Pasal mengenai hak asasi manusia terutama pada Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk perlindungan terhadap diri pribadi dan kedua adanya penegasan dalam RUU mengenai larangan jual beli data pribadi. Terkait demikian berdasarkan Buku I KUHPerdata dan ditegaskan dalam dan rumusan pengaturan RUU PDP maka data pribadi bukan sebagai hak kebendaan.[[51]](#footnote-51)

**BAB III**

**UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PERBUATAN JUAL BELI DATA PRIBADI**

1. **Jual Beli Data Pribadi**

Jual beli secara konvensional yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari adalah jual beli antara tangan ke tangan yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi dan tidak perlu di muka umum. Bentuk jual beli terutama bila objeknya barang-barang bergerak cukup dilakukan dengan lisan, kecuali mengenai benda-benda tertentu terutama mengenai objek benda-benda tidak bergerak pada umumnya, selalu memerlukan bentuk akta jual beli.[[52]](#footnote-52)

Pasal 1457 KUHPerdata menunjukkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar yang memiliki nilai atau manfaat dengan atas dasar merelakan atau saling terbuka.[[53]](#footnote-53)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menunjukkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik data pribadi adalah individu yang melekat data perseorangan tertentu.

Data pribadi dianggap sebagai hak kebendaan. Data pribadi berimplikasi sebagai hak asasi manusia yang melekat pada individu sehingga tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Penggunaan data pribadi tersebut oleh pihak lain harus berlandaskan persetujuan individu yang bersangkutan. Data pribadi juga dianggap sebagai properti hak privasi yang dimaksudkan sebagai perlindungan yang melekat terhadap data pribadi sebagaimana hak kebendaan yang dapat dialihkan oleh pemegang hak kepada pihak lain. Secara garis besar, data pribadi dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menjadikan data pribadi melekat pada tiap individu.[[54]](#footnote-54)

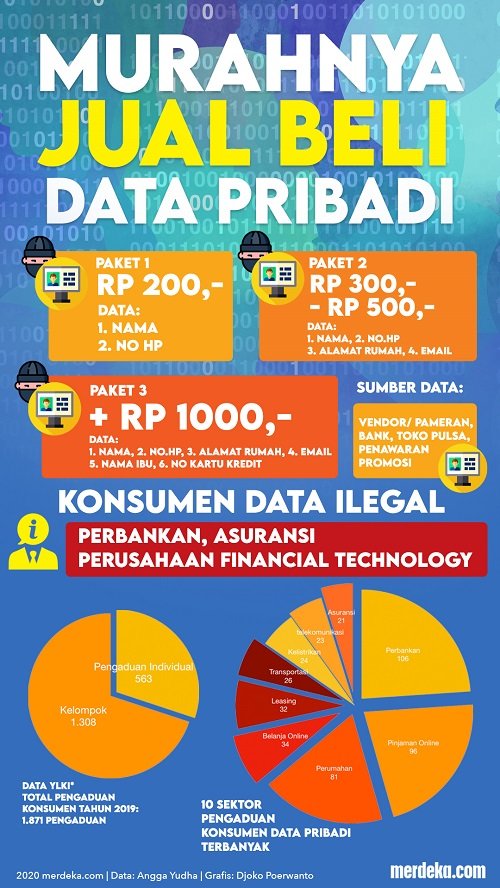
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menunjukkan bahwa jual beli data pribadi merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia. Meskipun saat ini, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif. Perlindungan terhadap data pribadi secara umum sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Selain itu, terdapat paling tidak 30 regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data, dalam kaitannya dengan HAM, pertahanan keamanan, kesehatan, administrasi kependudukan, keuangan dan perbankan, serta perdagangan dan perindustrian. Aturan tersebut juga tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDSE) yang ditetapkan pada 7 November 2016. Terkait demikian, praktik jual beli data pribadi dianggap melanggar peraturan yang ada.[[55]](#footnote-55)

Data pribadi dapat diperjualbelikan kepada berbagai pihak seperti swasta bahkan pemerintah. Data pribadi tersebut digunakan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pihak pembeli. Selain itu, ketika dilakukan proses datafikasi akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat digunakan untuk pengembangan bisnis, pengambangan pemasaran dan lain sebagainya sehingga semua pihak mulai dari swasta sampai pemerintah berkepentingan untuk mencari data, untuk menambang data dan untuk melakukan datafikasi terhadap data. Pihak pemerintah membutuhkan data pibadi untuk mengidentifikasi atau memprediksi kerusuhan sosial misalnya atau untuk kepentingan mengontrol warga. Sedangkan pihak swasta memiliki kepentingan yang lebih beragam tergantung masing-masing *platform*. Hal yang paling umum terjadi adalah data pribadi dijualbelikan untuk kepentingan algoritma menarik konsumen. Pihak swasta menganggap data pribadi seperti tambang emas namun masyarakat di Indonesia belum terlalu sadar betapa berharganya data pribadi bagi pihak swasta tersebut.[[56]](#footnote-56)

Praktiknya, terdapat beberapa situs yang menjual data pribadi terutama data milik nasabah kartu kredit di mana situs tersebut menjual 945.800 data pribadi dan situs tersebut membanderol satu data pribadi dengan harga Rp 5.000. hal ini menunjukkan bahwa 945.800 data pribadi dijual dengan harga Rp 4,7 miliar. Data pribadi dalam situs tersebut menyediakan nama, nomor ponsel, alamat rumah, jenis bisnis, nomor kartu kredit, nomor KTP, limit kartu kredit sampai jumlah deposito.[[57]](#footnote-57)

Pada sisi lain, data pribadi dapat dibeli dari seorang mafia. Mafia tersebut memperoleh data dengan cara manual, biasanya dari berbagai vendor acara misalnya pameran hingga acara konser musik. Data dari para konsumen atau klien tersebut dijual kepada mafia data. pada satu hari pameran berlangsung, ratusan bahkan ribuan orang datang di mana orang-orang tersebut diinta untuk mengisi data diri di setiap toko apabila ingin memperoleh promo. Tanpa peduli, pihaknya dengan mudah mengisi data pribadi seperti nama, nomor ponsel dan alamat rumah.

**1.1 Daftar Harga Data Pribadi**



Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa harga yang ditawarkan untuk jual beli data pribadi cukup beragam, mulai dari Rp 2000 per data yang berupa nama dan nomor ponsel. Apabila disertai dengan alamt rumah dan email maka terdapat kenaikan harga menjadi Rp 300 sampai Rp 500 data. Data pribadi tersebut dijual per paket di mana satu paket berisi seribu data.[[58]](#footnote-58)

Pakar Keamanan Siber dari Cissrec menunjukkan bahwa sejumlah data pribadi dijual dimulai dari Rp 7.000. Harga termurah adalah identitas diri yaitu nama, e-mail, nomor telepon dan akun layanan berlangganan. Sementara untuk data paspor dan kartu kredit dijual Rp 84.000 - Rp 280.000. Data rekam medis berkisar Rp 14.000 - Rp 420.000, swafoto dan dokumen Rp 560.000 – Rp 840.000, serta akun Paypal dibandrol paling mahal yaitu Rp 700.000 hingga Rp 7.000.000. Beberapa data yang dicari oleh pembeli misalnya data kartu kredit, akses perbankan dan layanan pembayaran elektronik. Ada juga yang menjual data catatan medis pribadi serta *selfie*. Data seperti akses ke akun pribadi atau *database password* bisa disalahgunakan untuk keuntungan finansial. Selain itu juga kerugian reputasi dan kerusakan sosial lain termasuk *doxing*. Data-data yang bertebaran akibat kebocoran data di sejumlah *platform* dapat digabungkan oleh para pelaku kejahatan.[[59]](#footnote-59)

1. **Upaya Pencegahan terhadap Perbuatan Jual Beli Data Pribadi**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menunjukkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik data pribadi adalah individu yang melekat data perseorangan tertentu.

Konsep perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan hak privasi, di mana pemilik data memiliki kuasa atau kendali untk menyebarkan atau tidak informasi yang dimiliki. Namun nyatanya, perlindungan data sebagai hak asasi manusia terbentur oleh lajur kapital karena secara ekonomi data pribadi memiliki nilai jual tinggi yang mampu memutar roda perekonomian global. Kondisi ini menjadi ancaman nyata mengingat pemanfaatan teknologi tidak lagi dapat dibendung termasuk kegiatan pengumpulan data pribadi secara massal baik secara *online* maupun *offline*, melalui media sosial, catatan kependudukan, kesehatan, perekonomian sampai penegakan hukum. Terkait demikian, diperlukan peran Negara untuk membuat Undang-Undang dalam memberikan jaminan perlindungan data privasi masyarakat. Indonesia dianggap masih absen dalam perlindungan data pribadi. Hal tersebut berdampak pada mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh swasta atau Negara tidak memiliki kepastian hukum dan berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan. Efek nyata yang tampak adalah masyarakat dirugikan karena tidak ada perlindungan pada data privasi.[[60]](#footnote-60)

Perlindungan data pribadi menyangkut data diri seseorang yang dapat diidentifikasi atau teridentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik. Data ini termasuk nomor telepon, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua, keluarga, alamat, riwayat kesehatan dan sebagainya yang melekat pada diri individu. Kasus penipuan kartu kredit, peminjaman uang atau penggelapan sering kali melibatkan penggunaan data pribadi ini. Pada beberapa kasus, data diri sengaja dijual atau dibocorkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Literasi digital perlu mengedukasi seluruh pihak untuk membangun kesadaran atas perlindungan data diri ini.[[61]](#footnote-61)

Keamanan daring menyangkut kemampuan untuk memaksimalkan keamanan personal dan risiko keamanan saat menggunakan internet. Misalnya keamanan dalam menyimpan data-data daring, keamanan dalam melakukan transaksi perbankan dan keamanan saat jual beli *online*. Literasi digital perlu menyampaikan pentingnya menggunakan antivirus di komputer dan ponsel pintar, menggunakan *password* yang sulit diduga, tidak mengunduh sembarang aplikasi, menghindari situs atau aplikasi tertentu tanpa menyelidika terlebih dahulu. Selain itu, perlu juga memperbarui *sofware* dan menyimpan data di beberapa tempat untuk menghindari kehilangan data yang tidak terduga. Privasi individu merupakan hak dan kemampuan individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur dan menghapus informasi tentang diri. Termasuk dalam mengontrol privasi ini adalah memutuskan kapan, bagaimana dan untuk apa informasi disampaikan ke pihak lain. Privasi individu ini penting karena menyangkut rahasia diri seseorang yang apabila dikuasai pihak lain akan dapat mengancam keselamatan.[[62]](#footnote-62)

Pada era industri 4.0 seperti sekarang ini, data merupakan aset penting dan perolehannya pun semakin mudah. Sata pembeli membuat akun di suatu *website* penyelenggara *e-commerce*, maka pembeli akan diminta untuk memasukkan data pribadi dan data pribadi tersebut akan masuk ke dalam sistem yang dikelola oleh penyelenggara bisnis *e-commerce* atau penjual. Kondisi ini membuat data pribadi harus dilindungi mulai dari perolehan, penggunaan, pengolahan, penyebaran hingga pemusnahan data pribadi. Aturan-aturan tersebut dapat diakomodir dalam *privacy policy* atau kebijakan privasi. Ketika pembeli bertransaksi melalui *website* atau media elektronik yang dikelola penyelenggara *e-commerce*, maka pembeli akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan penyelenggara *e-commerce* atau penjual dalam kebijakan privasi.[[63]](#footnote-63)

Konsep perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan hak privasi. Konsep *information privacy* menegaskan kembali bagaimana pemilik data memiliki kuasa atau kendali untuk menyebarkan atau tidak informasi yang dimiliki. Namun gagasan idel perlindungan data sebagai hak asasi manusia tersebut berbentur oleh lajur kapital. Secara ekonomi, data pribadi memiliki nilai jual tinggi yang mampu memutar roda perekonomian global. Hal tersebut tentunya menjadi ancaman nyata mengingat arus deras pemanfaatan teknologi tidak lagi dapat dibendung. Ini termasuk kegiatan pengumpulan data pribadi secara massal baik secara *online* maupun *offline*, melalui media sosial, catatan kependudukan, kesehatan, perekonomian hingga penegakan hukum. Pada konteks ini, peran Negara diperlukan untuk menjamin perlindungan data privasi masyarakat.

Secara garis besar, Pasal 16 Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik menjelaskan bahwa regulasi tersebut harus memungkinkan individu menentukan jenis data yang akan diserahkan serta tujuan dari pengumpulan data. Negara juga perlu memiliki standar prosedur untuk etiap indtitusi pengumpul data yang memuat mekanisme pemulihan setelah terjadinya pelanggaran data pribadi. Indonesia memiliki 30 regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi, termasuk penyadapan. Kewenangan tersebut dilakukan untuk berbagai macam bidang seperti media telekomunikasi, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kesehatan, kependudukan, perdagangan serta perekonomian. Namun, tidak seluruhnya memberikan perlindungan hukum yang nyata dengan prosedur yang jelas.

Pada bidang perbankan misalnya, pengakuan kewajiban perlindungan data nasabah ditemukan dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah. Setelah kehadiran UU Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban Bank Indonesia untuk melindungi data nasabah digantikan oleh lembaga independen OJK. Namun UU tersebut belum menjelaskan mekanisme pemulihan apabila terjadi pelanggaran. Hal tersebut juga belum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yang seharusnya mengakomodasi kerugian konsumen dalam hal kebocoran data. Kondisi yang sama juga terjadi pada konteks data pribadi ssecara viral di internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai salah satu regulasi hukum internet juga belum memberikan perlindungan data pribadi. Pasal 26 UU ITE memberikan gambaran umum mengenai persyaratan persetujuan pemilik data dalam segala akses data pribadi di media elektronik, tetapi tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme internal yang harus dilakukan pengumpulan data dan tindakan setelah terjadinya pelanggaran. Uraian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih absen dalam perlindungan data pribadi. Dampaknya, mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh swasta maupun Negara tidak memiliki kepastian hukum dan berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan sehingga warga kembali dirugikan karena data privasinya tidak dapat dilindungi padahal perlindungan data pribadi berdampak baik bagi perekonomian Negara. Adanya perlindungan membuat Indonesia memperoleh kesempatan dari investor dengan menciptakan lingkungan bisnis yang nyaman dan tepercaya termasuk kepentingan konsumen, yang akan merasa aman dalam melakukan transaksi ekonomi. Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi penting karena mereproduksi kebebasan warga dalam berekspresi. Keberanian warga dalam mengekspresikan gagasan akan terlaksana apabila dirinya telah memperoleh jaminan perlindungan privasi.[[64]](#footnote-64)

Upaya penanggulangan kejahatan jual beli data pribadi selama ini selalu dikedepankan upaya represif yang bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan dengan memaksimalkan Undang-Undang yang ada di antaranya KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Sejauh ini belum ada kebijakan terkait dengan perlindungan data masyarakat serta kasus kebocoran data masyarakat untuk diperjual belikan semakin sering terjadi. Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi yang komprehensif mengenai data pribadi dalam satu peraturan khusus mengingat konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan data dalam UUD 1945. Pada UUD 1945, secara implisit menunjukkan bahwa terkait perlindungan data hanya ditemukan pada Pasal 28F dan Pasal 28 G ayat (1) mengenai kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan atas data dan informasi yang melekat kepadanya.

Polri dalam hal ini selaku lembaga Negara yang diberikan kewenangan sebagai operator penegak hukum dapat memelihara keamanan dan menciptakan keteraturan sosial, serta diharapkan mampu berfungsi untuk mewujudkan hal tersebut melalui fungsi kepolisian yang dimiliki yakni fungsi pre-emtif, preventif dan represif. Faktanya di dalam permaalahan sosial di masyarakat yang menyangkut sebuah tindakan pelanggaran atau kejahatan pidana, Polri selalu melibatkan dan dituntut untuk mendepankan fungsi represif agar dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Sejatinya sebuah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana dapat dikatakan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hukum pidana itu sendiri hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki keterbatasan di mana keterbatasan ada di dua sisi yakni:

1. Hakikat terjadinya kejahatan

Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, jadi hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam akar persoalan kejahatan, jika tidak dibantu oleh disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.

1. Hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri

Penggunaan hukum pidana pada akhirnya hanya obat sesuai dengan penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyesuaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyakitnya. Hukum pidana dianggap berfungsi setelah kejahatan terjadi sehingga hukum pidana tidak memiliki efek pencegah sebelum kejahatan terjadi.

Paradigma Polri sejak era reformasi mulai mengembangkan cara-cara yang lebih humanis dengan berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah masyarakat dengan berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kedekatan masyarakat yang lebih manusiawi. Paradigma Polri yang humaniss dapat diwujudkan apabila Polri mampu untuk hadir, hidup dan merasakan denyut nadi kehidupan masyarakatnya. Interaksi yang terus-menerus tersebut tentunya menjadikan Polri lebih mudah mencari jalan keluar atau menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat, terutama masalah keamanan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehingga ke depan Polri dapat lebih berupaya untuk meningkatkan kualtas hidup masyarakat dengan lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas daripada penegakan hukum. Konteks pencegahan atau upaya preventif merupakan segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban dengan mengupayakan pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Upaya pencegahan terebut dilakukan dengan mereduksi lahirnya niat dan kesempatan bagi pelaku yang akan berbuat kejahatan melalui upaya-upaya menciptakan, merekayasa, mempersulit sebuah kondisi yang dapat membuat para pelaku kejahatan tidak mampu berniat dan berbuat tindakan kejahatan. Upaya-upaya pencegahan ini tidak saja dilakukan hanya oleh lembaga kepolisian saja, namun mengorganisasikan para stakeholder pemangku kepentingan dan masyarakat yang mempunyai keahlian, kepedulian dan *interest* terhadap sebuah pengertian tentang keamanan bersama.[[65]](#footnote-65)

Praktiknya, data pribadi dapat diambil oleh orang yang berniat untuk melakukan kejahatan dengan mengambil data dari situs web, media sosial, data pribadi yang tersebar di internet dan juga diambil dari *marketplace* karena sekarang ini marak terjadi jual beli transaksi melalui *marketplace*. Upaya atau cara yang dilakukan untuk meminimalisir atau menekan bahkan mencegah penyalahgunaan dan penjualan data pribadi adalah dengan membatasi eksistensi di internet, selektif untuk mempublikasikan data diri di internet, memahami peraturan perlindungan data pribadi serta sebaiknya menggunakan sistem aplikasi pengamanan data.[[66]](#footnote-66) Selain itu, cara yang dapat dilakukan untuk melindungi data pribadi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab antara lain:[[67]](#footnote-67)

1. Menggunakan *password* yang rumit

Akun-akun pengguna dapat diretas apabila kata sandi (*password*) mereka lemah. Ketika diretas, para oknum tidak bertanggung jawab bebas melakukan apa pun terhadap data-data yang tercantum di akun tersebut. Menggunakan kata sandi yang sedikit rumit untuk akun-akun yang meminta data pribadi seperti akun media sosial, akun email dan sebagainya. Selain itu, dapat juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi *password manager* yang dapat diunduh secara gratis di *Play Store* atau *App Store*.

1. Menggunakan VPN atau peramban *private*

Oknum tidak bertanggungjawab biasanya menggunakan lokasi target untuk menjalankan niat buruk. Terlebih apabila memanfaatkan koneksi umum seperti Wifi sehingga oknum tersebut akan lebih mudah untuk menyusupi celah keamanan perangkat pengguna karena data yang tersebar di Wifi biasanya tidak aman.

1. Menghindari mengunggah foto dokumen atau identitas pribadi

Foto dapat menjadi sasaran bagi orang yang tidak bertanggungjawab terlebih dokumen-dokumen pribadi. Terkait demikian, diupayakan untuk menghindari mengunggah gambar yang berkaitan dengan informasi pribadi di ranah maya. Apabila sebuah aplikasi meminta foto identitas maka harap dipastikan bahwa aplikasi terebut memang teperaya dan berguna.

1. Mengunduh aplikasi dari sumber resmi

Aplikasi yang diunduh dari sumber yang tidak resmi biasanya ditempeli oleh *malware* hingga *adware*. Kedua program jahat tersebut dapat menjangkit perangkat dan kemudian menyedot seluruh informasi yang berada di ponsel. Terkait demikian, diharapkan hanya mengunduh aplikasi hanya dari Play Store (untuk ponsel Android) dan App Store (untuk ponsel iOS).

1. Mencari tahu perusahaan yang ingin dilamar

Pada era sekarang, lamaran pekerjaan biasanya dikirimkan melalui *online*. Para perusahaan juga banyak yang mem*posting* lowongan pekerjaan di internet agar lebih mudah dijangkau oleh para pelamar. Pada sisi lain, terdapat oknum yang menjual data pribadi menggunakan modus memberikan lowongan pekerjaan kepada pengguna. Terkait demikian diharapkan dapat melakukan riset terhadap perusahaan pemberi lowongan pekerjaan tersebut dan cari tahu informasi lebih lanjut mengenai keabsahan lowongan pekerjaan tersebut.

1. Membatasi informasi pribadi di media sosial

Media sosial sejatinya merupakan portofolio individu di dunia maya sehingga orang lain bisa tahu satu atau dua hal tentang diri per individu. Terkait demikian, tiap individu diharapkan dapat menghindari untuk mencantumkan informasi terkait data-data pribadi, seperti nomor telepon, e-mail, dan data lainnya, di platform media sosial. Apabila memang diperlukan, individu dapat merubah *visibility* media sosial dari *public* menjadi *private*.

1. Memperhatikan izin aplikasi

Aplikasi-aplikasi di *smartphone* dapat melakukan apa saja, seperti mengumpulkan informasi data pribadi penggunanya, apabila memang diizinkan oleh pengguna yang bersangkutan. Kondisi tersebut menjadikan oknum yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan celah untuk mencuri data-data pribadi dan kemudian menjual data pribadi tersebut. Terkait demikian, individu diharapkan dapat membaca keseluruhan persetujuan dan data yang diambil aplikasi tersebut sebelum menggunakan aplikasi bersangkutan.

1. Tidak asal klik tautan

Selain lewat internet, oknum pencuri data pribadi dapat menggunakan modus SMS dengan menawarkan sejumlah informasi menguntungkan, seperti tawaran pinjaman *online* dengan mudah. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, individu tinggal mengklik tautan yang tercantum di SMS yang berasal dari nomor yang biasanya acak. Pada kondisi ini, individu diharapkan untuk tidak meng-klik tautan tersebut. Hal ini dikarenakan individu tidak mengetahui apa isi tautan tersebut dan SMS tersebut juga belum diketahui sumbernya dari mana. Individu dapat melakukan *googling* nomor telepon pengirim SMS tersebut di internet apabila ingin mencari tahu apakah nomor telepon tersebut merupakan modus penipuan atau bukan.

Penelitian Lesmana, Elis dan Hamimah menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, dengan banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan data pribadi sehingga Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat segera disahkan sebagai bentuk perwujudan perlindungan Negara atas pemenuhan hak privasi warna Negara.[[68]](#footnote-68) Pada sisi lain penelitian Kosegeran, Rumimpunu dan Tooy menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral Pengaturan perlindungan data pribadi pada level Undang-Undang dibutuhkan karena perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi warga Negara. Selain itu, implementasi dari kebijakan hukum perlindungan data saat ini dinilai belum berjalan dengan baik.[[69]](#footnote-69) Senada dengan hal tersebut, penelitian Kusnadi dan Wijaya juga menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan pada data pribadi.[[70]](#footnote-70)

Bagi pihak pemiliki data pribadi maka harus bertanggung jawab atas data yang diberikan sudah benar dan sesuai dengan data pribadinya sendiri bukan data pribadi orang lain, sedangkan tanggung jawab dari pemegang data pribadi orang lain harus bertanggung jawab melindungi data pribadi milik orang lain, bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan, diperjelas lagi bahwa yang dimaksud obyek penelitian di dalam pasal tersebut adalah kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya. Terkait demikian, harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data untuk menggunakan datanya, sedangkan kebocoran data pribadi yang marak terjadi adalah tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi, maka dari itu perlu adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai permasalahan ini.

Pengesahan sebuah Rancangan Undang-Undang menjadi sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang memang tidak mudah, butuh banyak proses panjangan sebelum dijadikan sebagai Undang-Undang yang sah yang isinya dapat dijalankan, salah satu prosesnya yaitu proses pengharmonisan. Pengharmonisan dianggap sebagai upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undang dengan peraturan perundang-undangan lain di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pengesahan RUU PDP ini sangat penting untuk kebanyakan masyarakat, apalagi zaman sekarang perkembangan teknologi yang diiringi dengan perkembangan internet semakin pesat dan canggih. Maka pertanggungjawaban yang diharapkan dari pemerintah adalah dengan cara mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun dijelaskan adanya asas pertanggungjawaban yang dimaksudkan agar semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi untuk bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk pemilik data pribadi.

Pemerintah harus mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana pengesahan RUU PDP tersebut termasuk tanggung jawab yang dapat diberikan pemerintah karena RUU PDP akan menjamin perlindungan terhadap pemilik data pribadi. Pemerintah juga dapat mengupayakan penindakan terhadap pelaku kebocoran data dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan Bab XIII dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai Ketentuan Pidana yakni:

1. Setiap orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini:

1. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap perbuatan jual beli data pribadi menunjukkan bahwa saat ini pemerintah berupaya untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum pengaturan data pribadi Indonesia yang mengacu kepada *European Union General Data Protection Regulation* (selanjutnya disebut EU GDPR). Data pribadi sebagai hak dasar dalam kerangka hak asasi manusia, landasan yuridis dalam dasar menimbang RUU PDP maupun diuraikan dalam naskah akademik yang mengacu kepada Pasal mengenai hak asasi manusia terutama pada Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk perlindungan terhadap diri pribadi dan adanya penegasan dalam RUU mengenai larangan jual beli data pribadi.
2. Upaya pencegahan terhadap perbuatan jual beli data pribadi dilakukan dengan membatasi eksistensi di internet, selektif untuk mempublikasikan data diri di internet, memahami peraturan perlindungan data pribadi serta sebaiknya menggunakan sistem aplikasi pengamanan data. Selain itu, pemerintah harus mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana pengesahan RUU PDP tersebut termasuk tanggung jawab yang dapat diberikan pemerintah karena RUU PDP akan menjamin perlindungan terhadap pemilik data pribadi. Pemerintah juga dapat mengupayakan penindakan terhadap pelaku kebocoran data dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan Bab XIII dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai Ketentuan Pidana.
3. **Saran**

Berikut saran yang dapat diajukan terkait dengan kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini:

1. Pihak pemerintah diharapkan dapat segera mengesahkan UU Perlindungan Data Diri dan menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat.
2. Masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menunjukkan data diri terutama ketika datang ke acara tertentu atau pada saat melakukan registrasi di aplikasi tertentu. Hal ini dilakukan untuk menekan upaya jual beli data pribadi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku/Literatur**

Akbar, M. A., & Alam, S. N. (2020). *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital.* Medan: Yayasan Kita Menulis.

Amin, R. (2020). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika.* Sleman: Deepublish.

Barkatullah, A. H. (2020). *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia.* Yogyakarta: CV Hikam Media Utama.

Candra, S. (2021). *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif: Telaah Kritis Implikasi Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Administratif di Bidang Lingkungan Hidup terhadap Pertanggugjawaban Pidana Korporasi.* Jakarta: Kencana.

Data, P., & Tempo, A. (2019). *Beragam Cara Pembobolan ATM Yang Patut Diwaspadai.* Jakarta: Tempo Publishing.

Data, P., & Tempo, A. (2019). *Untung Rugi Data Konsumen di Era Digital.* Jakarta: Tempo Publishing.

Efendi, R. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.* Sleman: Deepublish.

Hakim, L. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa.* Sleman: Deepublish.

Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.* Jakarta: Kencana.

Is, M. S. (2021). *Aspek Hukum Informasi di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Jiwantara, F. A., & Medyantara, I. S. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban.* Guepedia.

Kurniawan, S. (2021). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia.* Malang: Media Nusa Creative.

Kusuma, I. M. (2019). *Pembaharuan Kewenangan KPK.* Bandung: PT Alumni.

Kusumo, B. A. (2020). *Arti Pentingnya Pajak dalam Pembangunan di Indonesia.* Surakarta: UNISRI Press.

Nainggolan, K. M. (2021). *Tinjauan Yuridis: Pertanggungjawaban Pidana istri yang Menerima Nafkah dari Hasil Pencucian Uang.* Bekasi: CV Azka Pustaka.

Noventri, A. C., Sejati, N. R., & Putri, S. I. (2021). *Juris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum Jilid III Hukum dan Teknologi.* Yogyakarta: Nas Media Pustaka.

Noventri, A. C., Sejati, N. R., & Putri, S. I. (2021). *Noering Ratu Fathela Fauziah Sejati dan Sabrina Indrawati Putri, Juris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum Jilid III Hukum dan Teknologi.* Makassar: Nas Media Pustaka.

Nuraeny, H. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya.* Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetyo, D. (2021). *Aksara Presisi Membangun Polri: Kolaborasi pemikiran Teknorat Kepolisian.* Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Priyatno, D. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi.* Jakarta: Kencana.

Priyatno, D., & Kristian. (2017). *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Rahayu, Kurnia, N., Setianto, W. A., Adiputra, W. M., Monggilo, Z. M., Tania, S., & Prayitno, R. K. (2021). *Perempuan dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan dan Arah Pemberdayaan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rohman, H. (2020). *Hukum Jual Beli Online.* Pamekasan: Duta Media Publishing.

Ruba’i, M. (2021). *Hukum Pidana.* Malang: Media Nusa Creative.

Schwab, K. (2016). *Revolusi Industri Keempat.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Siregar, P. (2014). *Bebaskan Utangmu: 27 Studi Kasus Menyelesaikan Utang Secara Legal.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiharto. (2022). *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri: Filosofi, Formulasi dan Implementasi.* Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

Wismantoro, Y., Aryanto, V. D., & Andono, P. N. (2020). *Literasi Fintech Melalui Pendekatan Marketing Sosial (Konsep, Problem dan Studi Empiris).* Yogyakarta: Kanisius.

Yahman, & Tarigan, N. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

1. **Karya Ilmiah, Jurnal dan Tesis**

Angriani, P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 19 Nomor 2 Desember 2021*.

Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo Volume 6 Nomor 1 Agustus* .

Kosegeran, G., Rumimpuni, D., & Tooy, C. S. (2021). Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin. *Lex Privatum Vol IX/No 12/Nov/2021*.

Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No 1 2021*.

Lesmana, T., Elis, E., & Hamimah, S. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi seagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 2*.

Natha, K. D., Budiartha, I. N., & Astiti, N. G. (2022). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Marketplace). *Jurnal Preferensi Hukum Vol 3 No 1 Maret 2022*.

Yunus, M., Hamdani, F. D., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 1 January 2018*.

Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur. *MIZAN: Journal of Islamic Law Vol 5 No 1.*

1. **Referensi Website**

Adilah, R. Y. (2020, February 17). Retrieved from <https://www.merdeka.com/khas/mafia-jual-beli-data-pribadi.html>

Bestari, N. P. (2021, September 7). Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210907115829-37-274255/banyak-data-pribadi-dijual-di-dark-web-harganya-bikin-kaget>

Bestari, N. P. (2022, September 2). Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220902063331-37-368651/13-miliar-data-kartu-sim-ri-diduga-bocor-siapa-yang-salah>

Clinten, B. (2019, August 2). Retrieved from <https://tekno.kompas.com/read/2019/08/02/16435557/jual-beli-data-pribadi-marak-ini-8-tips-untuk-melindungi-data-anda?page=all>

Indonesia, C. (2023, Maret 1). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190517134433-185-395737/melanggar-hukum-jual-beli-data-pribadi-terancam-denda-rp3-m>

Kominfo. (2019, May 17). Retrieved from <https://aptika.kominfo.go.id/2019/05/jual-beli-data-pribadi-brti-itu-melanggar-hukum/>

Maulida, L. (2022, September 2). Retrieved from <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/02/10000017/data-registrasi-sim-prabayar-diduga-bocor-kominfo-dukcapil-dan-operator-kompak?page=all>

Novika, S. (2020, November 20). Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5263253/marak-kasus-jual-beli-data-pribadi-dijual-ke-mana>

1. **Novina Putri Bestari**, “1,3 Miliar Data Kartu SIM RI Diduga Bocor, Siapa yang Salah?”, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220902063331-37-368651/13-miliar-data-kartu-sim-ri-diduga-bocor-siapa-yang-salah> pada 2 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Lely Maulida**, “Data Registrasi SIM Prabayar Diduga Bocor, Kominfo, Dukcapil dan Operator Kompak Mengelak”, diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/02/10000017/data-registrasi-sim-prabayar-diduga-bocor-kominfo-dukcapil-dan-operator-kompak?page=all> pada 2 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Pusat Data dan Analisa Tempo**, *Untung Rugi Data Konsumen di Era Digital*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), hal 30-38. [↑](#footnote-ref-3)
4. **Teddy Lesmana, Eva Elis dan Siti Hamimah**, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi seagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 3 No 2 2022. [↑](#footnote-ref-4)
5. **Gilbert Kosegeran, Diantje Rumimpuni, Christine S Tooy**, Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin, *Lex Privatum* Vol IX/No 12/Nov/2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. **Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya**, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No 1 April 2021. [↑](#footnote-ref-6)
7. **Lukman Hakim**, *Asas-asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Sleman: Deepublish, 2020), hal 6. [↑](#footnote-ref-7)
8. **Muhammad Sadi Is**, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal 42. [↑](#footnote-ref-8)
9. **Karto Manalu dan David Nainggolan**, *Tinjauan Yuridis: Pertanggungjawaban Pidana istri yang Menerima Nafkah dari Hasil Pencucian Uang*, (Bekasi: CV Azka Pustaka, 2021), hal 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. **Jacob Hattu**, Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, *Jurnal Belo Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020*, hal 16. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-11)
12. **Lukman Hakim**, hal 10. [↑](#footnote-ref-12)
13. **Lukman Hakim**, hal 11. [↑](#footnote-ref-13)
14. **Holilur Rohman**, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. **Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia**, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 1 January 2018*. [↑](#footnote-ref-15)
16. **Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi**, Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur, *MIZAN: Journal of Islamic Law Vol 5 No 1 (2021)*. [↑](#footnote-ref-16)
17. **Ardhana Christian Noventri, Noering Ratu Fatheha Fauziah Sejati, Sabrina Indrawati** **Putri,** *Juris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum Jilid III Hukum dan Teknologi*, (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021), hal 74. [↑](#footnote-ref-17)
18. **Rahayu, Novi Kurnia, Widodo Agus Setianto, Wisnu Martha Adiputra, Zainuddin Muda Z Monggilo, Syaifa Tania, Rahmi Kartika Sari Prayitno**, *Perempuan dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan dan Arah Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hal 65 [↑](#footnote-ref-18)
19. **Pusat Data dan Analisa Tempo**, hal 30-38. [↑](#footnote-ref-19)
20. **Teddy Lesmana, Eva Elvis dan Siti Hamimah**. [↑](#footnote-ref-20)
21. **Gilbert Kosegeran, Dientje Rumimpuni dan Christine S Tooy**. [↑](#footnote-ref-21)
22. **Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya**. [↑](#footnote-ref-22)
23. **Kadek Dio Ramadi Natha, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Gusti Ketut Sri Astiti**, Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (*Marketplace*), *Jurnal Preferensi Hukum* Vol 3 No 1 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-23)
24. **Parida Angriani**, Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 19 Nomor 2 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-24)
25. **Yahman dan Nurtin Tarigan**, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal 13. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid. [↑](#footnote-ref-29)
30. **Agus Yudha Hernoko**, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 42. [↑](#footnote-ref-30)
31. **Yahman dan Nurtin Tarigan**, hal 15. [↑](#footnote-ref-31)
32. **Bambang Ali Kusumo**, *Arti Pentingnya Pajak dalam Pembangunan di Indonesia*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), Hal 114. [↑](#footnote-ref-32)
33. **Firzhal Arzhi Jiwantara dan Ikang Satrya Medyantara**, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*, (Guepedia, 2020), Hal 28. [↑](#footnote-ref-33)
34. **Dwidja Priyatno dan Kristian**, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hal 13. [↑](#footnote-ref-34)
35. **Roni Efendi**, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2021), Hal 9 [↑](#footnote-ref-35)
36. **Dwidja Priyatno**, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal 137. [↑](#footnote-ref-36)
37. **Henny Nuraeny**, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal 48. [↑](#footnote-ref-37)
38. **Septa Candra**, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif: Telaah Kritis Implikasi Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Administratif di Bidang Lingkungan Hidup terhadap Pertanggugjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), Hal 27. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid. [↑](#footnote-ref-39)
40. **Rahman Amin**, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, (Sleman: Deepublish, 2020), Hal 34. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid. [↑](#footnote-ref-41)
42. **Syukri Kurniawan**, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), Hal 16. [↑](#footnote-ref-42)
43. **Sugiharto**, *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri: Filosofi, Formulasi dan Implementasi*, (Surabaya: CV jakad Media Publishing, 2022), Hal 70. [↑](#footnote-ref-43)
44. **Masruchin Ruba’i**, *Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), Hal 29. [↑](#footnote-ref-44)
45. **I Made Hendra Kusuma**, *Pembaharuan Kewenangan KPK*, (Bandung: PT Alumni, 2019), Hal 65. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid. [↑](#footnote-ref-46)
47. **Pusat Data dan Analisa Tempo**, *Beragam Cara Pembobolan ATM Yang Patut Diwaspadai*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), Hal 118. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibid. [↑](#footnote-ref-48)
49. **Pulo Siregar**, *Bebaskan Utangmu: 27 Studi Kasus Menyelesaikan Utang Secara Legal*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), Hal 81. [↑](#footnote-ref-49)
50. **Klaus Schwab**, *Revolusi Industri Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), Hal 93. [↑](#footnote-ref-50)
51. **Ardhana Christian Noventri**, *Noering Ratu Fathela Fauziah Sejati dan Sabrina Indrawati Putri, Juris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum Jilid III Hukum dan Teknologi*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2021), Hal 75. [↑](#footnote-ref-51)
52. **Abdul Halim Barkatullah**, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Hikam Media Utama, 2020), Hal 42. [↑](#footnote-ref-52)
53. **Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi**. [↑](#footnote-ref-53)
54. **Ardhana Christian Noventri, Noering Ratu Fatheha Fauziah Sejati, Sabrina Indrawati** **Putri,** hal 74. [↑](#footnote-ref-54)
55. **Kominfo**, “Jual-Beli Data Pribadi, BRTI: Itu Melanggar Hukum”, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2019/05/jual-beli-data-pribadi-brti-itu-melanggar-hukum/> pada 1 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-55)
56. **Soraya Novika**, “Marak Kasus Jual Beli Data Pribadi, Dijual Ke Mana?”, diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5263253/marak-kasus-jual-beli-data-pribadi-dijual-ke-mana> pada 1 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-56)
57. **CNN Indonesia**, “Melanggar Hukum, Jual Beli Data Pribadi Terancam Denda Rp 3M”, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190517134433-185-395737/melanggar-hukum-jual-beli-data-pribadi-terancam-denda-rp3-m> pada 1 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-57)
58. **Rifa Yusfa Adilah**, “Mafia Jual Beli Data Pribadi”, diakses melalui <https://www.merdeka.com/khas/mafia-jual-beli-data-pribadi.html> pada 1 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-58)
59. **Novina Putri Bestari**, “Banyak Data Pribadi Dijual di Dark Web, Harganya Bikin Kaget”, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210907115829-37-274255/banyak-data-pribadi-dijual-di-dark-web-harganya-bikin-kaget> pada 1 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-59)
60. **Pusat Data dan Analisa Tempo**, hal 30-38. [↑](#footnote-ref-60)
61. **Rahayu, Nov Kurnia, Widodo Agus Setianto, Wisnu Martha Adiputra, Zainuddin Muda Z Monggilo, Syaifa Tania, Rahmi Kartika Sari Prayitno, Astrid Permata Leona, Dewa Ayu Diah Angendari, Lidwina Mutia Sadasari, Mashita Fandiaa, Ardian Indro Yuwono, Anna Nurjanah**, *Perempuan dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan dan Arah Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), Hal 65. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ibid. [↑](#footnote-ref-62)
63. **Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam**, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), Hal 52. [↑](#footnote-ref-63)
64. **Pusat Data dan Analisa Tempo**, *Untung Rugi Data Konsumen di Era Digital*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), Hal 38. [↑](#footnote-ref-64)
65. **Dedi Prasetyo**, *Aksara Presisi Membangun Polri: Kolaborasi pemikiran Teknorat Kepolisian*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), Hal 109. [↑](#footnote-ref-65)
66. **Yohan Wismantoro, Vincent Didek Wiet Aryanto dan Pulung Nurtantio Andono**, *Literasi Fintech Melalui Pendekatan Marketing Sosial (Konsep, Problem dan Studi Empiris)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020, Hal 46. [↑](#footnote-ref-66)
67. **Bill Clinten**, “Jual Beli Data Pribadi Marak, Ini 8 Tips Untuk Melindungi Data Anda”, diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2019/08/02/16435557/jual-beli-data-pribadi-marak-ini-8-tips-untuk-melindungi-data-anda?page=all> pada 1 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-67)
68. **Teddy Lesmana, Eva Elis dan Siti Hamimah**. [↑](#footnote-ref-68)
69. **Gilbert Kosegeran, Diantje Rumimpuni, Christine S Tooy**. [↑](#footnote-ref-69)
70. **Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya**. [↑](#footnote-ref-70)